



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHMUD HD.
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 19622

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 691 m²/144 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.680.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/140 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.150.000

1. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 150.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 84.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 302.507.794

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.621.757.794

III. HUTANG Rp. 264.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.357.757.794

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.